



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Kebijakan dan Pengelolaan Pencegahan Abrasi di Pulau Bengkalis

Kebijakan penanggulangan abrasi yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis langsung ditangani oleh pemerintah pusat secara langsung melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, BRGM dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan restorasi gambut serta pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi sasaran. Dalam kegiatan lapangannya, lembaga ini mengkoordinasikan dan mendanai program melalui lintas kementerian dan berbagai lembaga pemerintah. Program rehabilitasi mangrove, selain untuk mengendalikan abrasi juga ditujukan untuk ketahanan masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Bengkalis. Program ini juga merupakan bagian dari proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama BRGM melaksanakan proyek mangrove untuk ketahanan masyarakat di kawasan pesisir di Indonesia (*Indonesia Mangrove for Coastal Resilience Project*), dengan melibatkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), lembaga pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan desa dan penyedia layanan pihak ketiga, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok masyarakat, perusahaan konsultan dan kontraktor (BPDLH et al., 2022; KLHK & BRGM, 2022).

Pulau Bengkalis merupakan bagian dari pulau kecil terluar yang memiliki titik pangkal koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,



2007). Kawasan pulau terluar ini merupakan kawasan strategis nasional tertentu. Kawasan ini merupakan bagian dari kedaulatan negara, pengendalian lingkungan, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan pulau-pulau terluar memerlukan perhatian khusus agar posisinya sebagai kawasan perbatasan negara berdaulat, tetap terjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan melibatkan lintas sektoral atau lintas departemen. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir telah diamanatkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Kondisi kawasan pesisir Pulau Bengkalis sebagai kawasan perbatasan telah rusak parah dan terus tergerus akibat abrasi, terjangan gelombang dan arus laut. Dalam hal ini pemerintah memang telah melakukan pembangunan pemecah gelombang, namun belum ditangani secara berkelanjutan, terbukti dengan minimnya pembinaan bagi kelompok yang ada karena pertimbangan keterbatasan dana. Bahkan beberapa kendala yang ditemukan dilapangan banyaknya permasalahan karena pemenang tender proyek yang bermasalah.

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kerusakan pantai akibat abrasi dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pemerintah mengintensifkan program rehabilitasi atau penanaman bibit mangrove di wilayah pesisir yang terkena abrasi. Namun, baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun program masyarakat banyak mengalami kegagalan. Sebagian besar bibit mangrove yang ditanam mati akibat terjangan ombak. Bibit mangrove yang ditanam tenggelam, hanyut dan mati. Kedua, pemerintah membangun pemecah gelombang dan membangun turap dari gorong-gorong untuk menahan gelombang yang terus menggerus bibir pantai. Program ini juga mengalami kelemahan, karena tidak bertahan lama setelah dibangun beberapa sudah rusak. Ketiga, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat yang tinggal di sekitar pantai untuk berpartisipasi aktif menjaga pantai.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ketiga cara ini berkaitan erat dan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan salah satunya saja. Poin ketiga merupakan komponen yang sangat penting, namun belum dibina atau diberdayakan untuk aktif dan terampil dalam menjaga lingkungan pesisir. Namun demikian, hal yang paling mendasar untuk diprioritaskan adalah kampanye dan gerakan komunikasi yang intensif agar seluruh masyarakat sadar untuk terlibat aktif. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menempatkan masalah ini sebagai masalah utama yang harus ditangani. Pemerintah berharap kawasan pantai Bengkalis yang rusak dapat diperbaiki dan direhabilitasi untuk mengendalikan abrasi. Program rehabilitasi ini disinergikan dengan pengembangan ekowisata daerah dan mendukung perekonomian masyarakat.

No	Metode penanggulangan	Stakeholder	Kelemahan
1	Mengintensifkan program rehabilitasi	Pemerintah pusat melalui program PEN Pemerintah daerah melalui program	Benih tidak tumbuh karena diterjang ombak
2	Membangun pemecah gelombang dan turab	Pemerintah pusat melalui beberapa kementerian	Beberapa mulai tenggelam dan turab mulai roboh
	Melibatkan komunitas untuk berpartisipasi	Mengajak masyarakat (nelayan, LSM, Kemangster, dll)	Pembinaan tidak berkelanjutan dan tidak rutin dilakukan



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pelaksanaan program rehabilitasi mangrove yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten Bengkalis di daerah yang terkena abrasi belum berhasil. Hal ini terlihat dari program rehabilitasi mangrove yang selalu gagal, karena bibit yang ditanam terkena ombak. Upaya yang telah dan masih dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menambah titik lokasi pemecah gelombang yang terletak di sebelah utara Pulau Bengkalis. Karena dana untuk pemecah gelombang membutuhkan dana yang besar, pemerintah daerah hanya sebatas membangun turap atau gorong-gorong di lahan pesisir tertentu. Di lokasi wisata Raja Kecil, pemecah gelombang dan gorong-gorong ini diharapkan berguna untuk menahan kuatnya arus Selat Malaka dan untuk melindungi bibit mangrove yang ditanam. Kepala Desa Muntai Barat menjelaskan tentang program pembangunan batu pemecah gelombang. Dalam hal ini, kepala Desa Muntai Barat menjelaskan:

“Pada 2020, pemerintah telah memulai pembangunan pemecah gelombang di Pantai Raja Kecil. Saat itu pembangunan tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Riau, dan pejabat lainnya. Ada juga Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Gubernur senang dan mengapresiasi apa yang dilakukan Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL). Komunitas ini telah berperan membantu pemerintah mengatasi abrasi di Kabupaten Bengkalis. Beberapa masyarakat telah pasrah melihat kebun mereka terkena abrasi. Meski pantai sudah ditanami mangrove, namun mangrove yang ditanam tersapu ombak. Ini karena ombaknya memang kuat dan mungkin waktu tanamnya tidak tepat saat musim utara tiba. (Wawancara, Subari, 21 April 2022).

Selain bertujuan untuk mengatasi abrasi parah di beberapa desa seperti di Desa Teluk Pambang, Muntai Barat, Bantan Air, Mentayan, Selatbaru dan beberapa desa lainnya, pembangunan batu pemecah gelombang ini diharapkan dapat menjadi solusi kegagalan bibit mangrove yang ditanam. Sehingga batu pemecah gelombang ini dapat melindungi mangrove yang ditanami oleh masyarakat. Sementara itu di beberapa desa dibangun turap atau gorong-gorong pelindung daratan dari abrasi. Dibeberapa desa dibangun ini untuk tujuan tidak hanya melindungi daratan, tapi berguna sebagai wisata seperti halnya di desa Muntai Barat, Bantan Air dan Selat Baru. Di Desa Muntai Barat,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pembangunan batu pemecah gelombang diberi nama Laksmana Raja Di Laut. Wisata Pantai Raja Kecil juga dibangun secara bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah pusat yang bertujuan sebagai objek wisata pantai yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada 28 September 2021, Joko Widodo selaku Presiden RI mengunjungi Pantai Raja Kecil dan terlibat langsung secara simbolis dengan masyarakat menanam sekitar 20.000 bibit mangrove. Kawasan objek wisata pantai ini merupakan sarana penyampaian pesan yang mendapat liputan nasional. Presiden mengkampanyekan pentingnya rehabilitasi mangrove dan mengkampanyekan kepedulian terhadap pulau terluar Indonesia ini. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lokasi prioritas dengan luasan rehabilitasi terluas. Kawasan pesisir ini masuk dalam Program Ekonomi Nasional (PEN) 2020-2021 untuk pemulihan mangrove di Provinsi Riau dengan luas 1.292 ha. Rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh BRGM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pendekatan PEN, tidak hanya bertujuan untuk melindungi ekosistem tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Selama bencana Covid 19 program PEN dapat membantu perekonomian masyarakat. Sejumlah masyarakat dari kelompok tani mangrove menjelaskan bahwa program pemerintah ini membantu keuangan dan permodalan untuk usaha masyarakat yang bergerak dalam pelestarian mangrove ini. Bahkan sebagian para pemuda dengan program padat karya melalui bantuan rehabilitasi mangrove ini dapat memodali atau membiayai niat mereka untuk mendapatkan kendaraan baru seperti sepeda motor.

Pemerintah melalui BRGM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak masyarakat untuk merehabilitasi mangrove. Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem agar tetap lestari. Karena program ini bersifat nasional, kampanye rehabilitasi mangrove tidak terpantau penanamannya. Sebagian besar bibit mangrove yang ditanam di lokasi ini sudah habis tersapu ombak, hanya sebagian kecil yang hidup. Gambar 2 menunjukkan presiden memberikan pidato yang menekankan pentingnya rehabilitasi untuk mengendalikan abrasi. Selain itu, kebijakan penanggulangan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

bencana abrasi melalui program ini diharapkan dapat mendukung ekowisata daerah dan akan mendukung perekonomian masyarakat.



**Gambar 5.** Salah satu pantai yang mengalami abrasi di Desa Muntai Barat.



**Gambar 6.** Postingan Instagram akun @brgm\_indonesia untuk kampanye rehabilitasi mangrove saat di Wisata Raja Kecil

Kebijakan pemerintah untuk membangun batu pemecah gelombang, membantu beberapa fasilitas pariwisata, dan merehabilitasi pantai dengan melibatkan masyarakat dapat menjadi salah satu solusi mengatasi abrasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti di wisata pantai Raja Kecil. Namun program rehabilitasi ini masih belum berkelanjutan karena tidak memperhatikan pemeliharaan pasca tanam. Selain itu, pengembangan masyarakat belum dilakukan secara intensif untuk memberikan keahlian kepada masyarakat dalam mengelola ekowisata. Padahal pengembangan ekowisata harus berkelanjutan dan erat kaitannya dengan komunikasi lingkungan yang memiliki aspek pendidikan masyarakat luas. Selain itu, pengembangan pariwisata dan lingkungan yang berkelanjutan membutuhkan komunikasi dari banyak pemangku kepentingan, tidak hanya ditujukan kepada masyarakat lokal untuk partisipasi aktif, tetapi juga kepada pengunjung, untuk liputan media dan diskusi di media social (Yasir, Nurjanah, et al., 2021). Namun, kegiatan pengembangan pariwisata ini dapat menjadi saluran komunikasi dan interaksi sosial yang efektif untuk memberikan kesadaran lingkungan.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5.2 Komunikasi Lingkungan Melalui Pengembangan Wisata Pantai Berbasis Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (ISM-IPMPL) memiliki kontribusi penting dalam komunikasi lingkungan berbasis pengembangan wisata di Kabupaten Bengkalis. LSM ini banyak bergerak dalam membantu mengatasi permasalahan kebakaran lahan gambut dan abrasi di pantai. Namun demikian komunikasi lingkungan tidaklah sepihak, pemerintah melalui kementerian, badan yang dibentuk dan pemerintah daerah masing-masing memiliki program dan kebijakan yang diamanahkan undang-undang untuk melibatkan masyarakat setempat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. LSM-IPMPL telah memiliki rekam jejak dan hubungan yang baik dengan lembaga/instansi baik pusat maupun daerah sehingga mudah mendapatkan perhatian karena sama-sama memiliki kepentingan yaitu untuk melestarikan kawasan pesisir dan mencegah terjadinya abrasi semakin meluas. Selain itu memang LSM IPMPL ini juga membina ribuan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan mangrove dan kelompok tani hutan gerunggang.

Hingga saat ini kebijakan pemerintah pusat maupun Kabupaten Bengkalis dalam masih belum serius dalam menangani abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Bengkalis. Pengelolaan rehabilitasi mangrove untuk mencegah abrasi belum dilakukan secara berkelanjutan. Padahal kegiatan pembangunan berkelanjutan harus melibatkan masyarakat, sementara keterlibatan masyarakat harus membutuhkan komunikasi yang intens oleh pihak yang berwenang baik dari dinas-dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata dan dinas lain yang terkait. Demikian halnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, setidaknya harus rutin melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Komunikasi yang intens antar kementerian, instansi dan bidang terkait untuk selalu melakukan koordinasi terhadap program untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Beberapa program pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis untuk pengembangan ekowisata mangrove dengan membangun fasilitas wisatanya seperti di Desa Deluk, Desa Meskom dan beberapa desa lain



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dibangun tapi tidak dilakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat dan komunitas sebagai pengelolanya. Komunikasi lingkungan berbasis pengembangan ekowisata tidak dilakukan secara baik dan belum intensif dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan menyerahkan pada dinas lain seperti melalui dinas pariwisata dalam pengembangan wisata yang ada.

Hal ini juga terjadi pada Desa Muntai Barat, objek wisata yang diharapkan menjadi andalan adalah Raja Kecik. Daya tarik wisata unggulannya adalah Jembatan Datuk Bandar Jamal, pemandangan pantai, kuliner, dan batu-batu yang disusun untuk memecah gelombang sekaligus pelindung bibit mangrove dan bibir pantai dari abrasi. Selain itu ada berbagai acara lainnya seperti lomba mancing, acara keagamaan, dan lain-lain. Wisata pantai ini merupakan ide dari Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) dan dikelola oleh Ikatan Koperasi ini. Pemerintah melibatkan kelompok masyarakat yang peduli lingkungan sebagai aktor utama dalam pengembangan ekowisata pesisir. Selain itu, upaya pemerintah secara tidak langsung menjadikan masyarakat sebagai komunikator, saluran, media dan konten untuk menyebarkan pesan tentang peduli lingkungan, terutama untuk melindungi pantai dari abrasi. Hal ini terlihat ketika lokasi wisata pantai ini dikunjungi oleh presiden, kemudian lokasi ini menjadi viral di media sosial dan ramai diberitakan di media massa. Dari sisi sosialisasi, pesan kepedulian terhadap rehabilitasi mangrove ini banyak mendapat perhatian publik. Pengembangan ekowisata ini memiliki kontribusi penting bagi pelestarian ekosistem (Abidin et al., 2021). Oleh karena itu, pengembangan wisata bahari Raja Kecik diupayakan untuk mencegah dan melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Di sisi lain, keberadaan ekowisata dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, upaya pemerintah tidak banyak mengubah kondisi lingkungan di daerah yang terkena abrasi. Abrasi dan kerusakan mangrove dapat dikendalikan jika ada strategi yang tepat seperti mengevaluasi kegiatan penebangan mangrove, menerapkan kebijakan konservasi hutan mangrove, dan memberikan pendidikan konservasi mangrove untuk pembangunan berkelanjutan (Chen & Shih, 2019).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



**Gambar 7.** Pintu masuk Jembatan Datuk Bandar Jamal sebagai wahana Wisata Raja Kecil



**Gambar 8.** Batu pemecah gelombang, pengunjung dan pantai dalam postingan instagram @wisata\_raja\_kecik

Keberadaan wisata Raja Kecil dan jembatan Datuk Bandar Jamal yang menuju ke arah tengah laut sepanjang satu kilometer menjadi daya tarik wisata utama destinasi wisata ini (lihat gambar 3). Wisata ini dibangun dan dikelola oleh masyarakat setempat di bawah naungan Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) dan dinaungi oleh Koperasi Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL). Karena pendiri dan pengelola wisata ini merupakan aktivis lingkungan, tak aneh bila wisata ini bertujuan untuk mengkampanyekan kepedulian pada lingkungan. Organisasi ini bertujuan untuk mengatasi kerusakan di darat karena tanah gambut yang mudah terbakar dengan menanam pohon gerunggang dan mengelolanya dengan menjadi produk-produk olahan turunannya seperti atap (sirap), minyak untuk obat gosok, dan pernis kayu. Bahkan jenis tanaman gerunggang ini dapat mengurangi atau mencegah kebakaran lahan dan hutan karena keberadaannya meningkatkan kelembaban permukaan lahan, menurunkan suhu gambut dan meningkatkan permukaan air gambut.

Keberhasilan LSM IPMPL mengelola lahan untuk membudidayakan pohon gerunggang ini mempengaruhi pengelolaan wisata Raja Kecil. IPMPL mengelola lahan hutan dan dan mengelola pantai untuk kemudian mengkampanyekan pelestarian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lingkungan ini. Karena Pulau Bengkalis merupakan pulau terluar, tanah dan patainya terus tergerus, dan merupakan batas Negara maka lokasi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat bertanggung jawab melalui BRGM untuk melakukan rehabilitasi pantai dengan menanam mangrove untuk mengatasi kerusakan karena abrasi. Badan ini berkerjasama dengan LSM IPMPL dengan memberikan bantuan sarana fisik dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wisatanya. Sebagai badan yang menangani permasalahan mangrove, BRGM berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis untuk mengatasi abrasi di pantai Pulau Bengkalis.

Pengembangan wisata Raja Kecil diarahkan sebagai wadah dan serana komunikasi untuk mengkampanyekan kepada masyarakat pentingnya mencegah abrasi dengan merehabilitasi mangrove. Keberadaan Jembatan Datuk Bandar Jamal dimaknai sebagai simbol persatuan dan kemakmuran. Jembatan ini juga berarti menjaga negara harus menjaga kelestarian lingkungan. Hilangnya daratan Pulau Bengkalis merupakan ancaman hilangnya marwah Negara. Maka kerusakan ini harus dicegah, sebagaimana motto Presiden yaitu membangun negeri dari derah terluar atau perbatasan.

Pemilihan nama lokasi wisata tersebut dengan mengambil nama Raja Kecil memiliki makna yang dalam untuk disampaikan kepada masyarakat. Raja Kecil adalah nama raja dan pendiri kerajaan Siak, yaitu Sultan Abdul Jalil Rakhmat Syah. Begitu juga dengan pemilihan nama bangunan dan infrastruktur pendukung di lokasi wisata ini, yang kesemuanya memiliki nilai yang sangat berarti dan bersejarah. Nama-nama tersebut diambil dari adat dan tokoh Melayu di kerajaan Siak. Komunikasi lingkungan yang berkelanjutan melalui pariwisata membawa pesan penting untuk mencegah abrasi dengan melakukan rehabilitasi. Pesan ini disampaikan tidak hanya untuk mendidik, peduli terhadap lingkungan, tetapi juga untuk mengajarkan sejarah masa lalu. Wisata bahari dengan atraksi jembatan, pantai dan batu pemecah gelombang tidak membatasi orang, siapapun bisa melewati dan menikmati keindahan Raja Kecil (lihat gambar 4). Jembatan ini juga memiliki pesan agar masyarakat lebih peduli dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini juga menjadi saksi besarnya abrasi yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mencapai lebih dari satu kilometer kehilangan lahan di Desa Muntai Barat dan Bengkalis. Dalam hal ini ketua kelompok yang juga pengelola wisata menjelaskan:

“Jembatan ini merupakan ikon dari Pantai Raja Kecil. Kami membangunnya dengan kokoh di atas laut. Jembatan yang kami bangun satu kilometer. Ujung jembatan melewati batu pemecah gelombang yang memiliki beberapa spot foto disana. Wisata ini kami kembangkan bersama antara pemuda dan masyarakat. Kami mengenakan tarif kepada wisatawan yang memasuki objek wisata ini. Kami menggunakan uang itu sebagai dana pengembangan dan dana operasional untuk pemeliharaan fasilitas. Kami tetap harus memastikan keselamatan pengunjung selama berada di Jembatan Datuk Bandar Jamal. Karena bagaimanapun juga, jembatan ini berakhir di atas permukaan laut. Banyak pengunjung yang turun langsung ke pemecah gelombang atau turun langsung di bawah pasir untuk berfoto selfie di sana. Jadi untuk menghindari segala bentuk kemungkinan yang bisa terjadi. Kami menugaskan beberapa satpam untuk selalu standby di sana” (Wawancara, Solihin, 20 April 2022).

Kegiatan wisata masyarakat ini belum mendapat pembinaan dari Dinas Pariwisata Pemkab Bengkalis. Pemerintah daerah tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan wisata Raja Kecil bersama dengan pengelola karena tanahnya masih milik masyarakat. Masyarakat tidak bisa melakukan serah terima karena mereka beranggapan jika pembebasan lahan dilakukan maka semua pengelolaan akan dilakukan oleh pemerintah saja dan masyarakat tidak bisa ambil bagian di dalamnya. Bahkan aparat desa dalam hal ini juga tidak mau ambil bagian dalam pengelolaan pantai Raja Kecil karena lebih sepihak dengan pemerintah setempat. Pemerintah daerah hanya mampu memberikan dukungan moril dan dukungan seremonial dengan alasan keterbatasan dana. Karena pengembangan pariwisata ini dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pusat yang diserahkan langsung oleh pengelola (IPMPL). Dimas Asri Agustin selaku pejabat fungsional di bidang pariwisata Kabupaten Bengkalis menjelaskan:

“Pengelola pariwisata dan pemerintah daerah telah berkoordinasi untuk pengembangan pariwisata Raja Kecil. Pemerintah daerah memberikan dukungan untuk setiap desain yang akan dilakukan. Pengelola memang mengusulkan desain ke pemerintah provinsi dan dibantu oleh pemerintah daerah. Anggaran Pemkab Bengkalis terbatas, sehingga tidak mungkin kita habiskan hanya untuk pembangunan Pantai Raja Kecil. Wisata di Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

cukup banyak, kalau anggarannya hanya untuk pembangunan Raja Kecil, wisata di tempat lain tidak akan ada.” (Wawancara, DA Agustin, 18 April 2022).

Lahan wisata ini milik masyarakat, sehingga pengelolaan wisata Raja Kecil dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebagian masyarakat tersebut menyumbangkan tanahnya untuk pengembangan dan perluasan wisata pantai ini. Tentunya semangat masyarakat ini sangat baik sebagai modal pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di pesisir juga rela menanam mangrove untuk melindungi perkebunan mereka dari abrasi. Mereka terlibat dalam membangun pariwisata, sebagai penjual makanan, penjaga pantai, dan pemelihara fasilitas objek wisata. Hingga saat ini, masyarakat dalam pengelolaan pariwisata belum berdampak langsung dalam mencegah pantainya dari abrasi. Namun, mereka sudah mengetahui kampanye untuk menjaga pantai dari abrasi, tetapi mereka belum bisa berbuat banyak. Hal ini juga dikemukakan oleh Solihin:

“Masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan wisata pantai Raja Kecil. Sebagian besar pengelola juga merupakan masyarakat adat desa Muntai Barat. Keterlibatan masyarakat untuk mengubah nasib mereka adalah memberikan tanah mereka untuk kami gunakan sebagai keberlanjutan proyek pembangunan kami di sini. Kawasan pesisir ini merupakan kebun dari masyarakat sekitar, kami memiliki kontrak kerjasama dengan sistem bagi hasil. Daripada kebun terkena abrasi, lebih baik kita kembangkan. Orang-orang di sini ikhlas dan rela memberikan tanahnya untuk kita kelola bersama.” (Wawancara, Solihin, 22 April 2022).

Banyak aktivitas masyarakat mulai dari ritual ekonomi, budaya, sosial dan keagamaan dilakukan di lokasi wisata ini. Kegiatan ini dijadikan sebagai daya tarik bagi pengunjung. Semua itu dilakukan oleh masyarakat IPMPL bersama pengelola melalui koperasi sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola wisata pantai Raja Kecil. Beberapa pelatihan diperoleh kelompok masyarakat ini tentang kesadaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Kegiatan penanaman bibit mangrove dan dana rehabilitasi melalui program Pembangunan Ekonomi Nasional

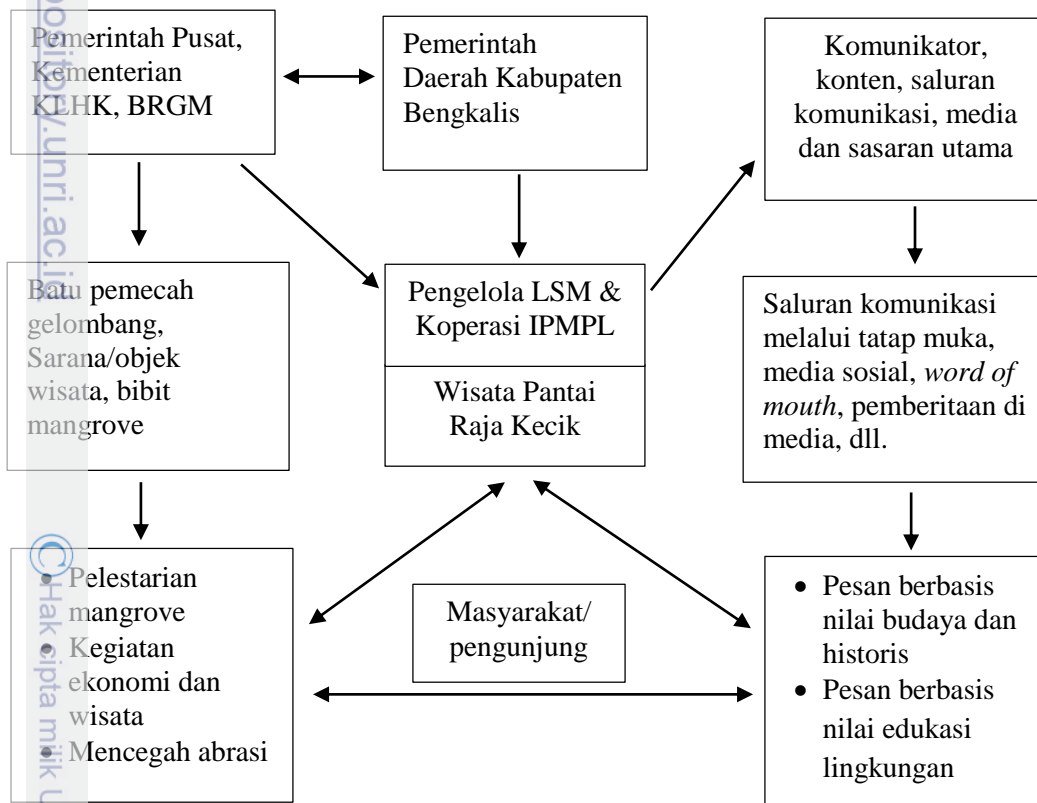




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

(PEN) juga diberikan kepada mereka. Namun bibit yang ditanam mati karena terjangan ombak. Program ini sangat bagus, namun pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat masih kurang. Terkait dengan hal tersebut, penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan sebagai kunci keberhasilan komunikasi lingkungan (Vlibeigi et al., 2020). Di sisi lain, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan memerlukan dukungan berbagai aktor dan banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk masalah abrasi ini, partisipasi berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam pengelolaan alam merupakan metode yang tepat untuk dilakukan dan dikembangkan (Jurczak, 2018; Yasir, Firzal, et al., 2021).

Gambar 9:  
Komunikasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Melalui Pengembangan Wisata untuk  
Mencegah Abrasi di Pantai Raja Kecil Kabupaten Bengkalis



Sumber: Hasil Penelitian 2022



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Komunikasi lingkungan untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dapat menjadikan pengelola ini sebagai komunikator, pesan, media, saluran dan sekaligus komunikan untuk mengkampanyekan kesadaran lingkungan (Yasir, Nurjanah, et al., 2021). Model Community Based Tourism (CBT) merupakan bentuk community-managed tourism dimana masyarakat lokal sendiri memiliki kontrol atas keterlibatan dalam pengelolaan dan pengembangannya (Sumarmi et al., 2021a). Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dan ikut serta dalam mengontrol pengembangan dan pengelolaan pariwisata Raja Kecil. Masyarakat harus diberikan pengetahuan yang lebih melalui pelatihan dan pendampingan agar lebih memahami dan mampu terus melakukan pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata. Masyarakat juga merupakan bagian dari pelaku usaha sebagai penggerak dan mampu menjadi subyek perubahan sosial terkait pengembangan produk dan pemasaran produk lokal yang dihasilkan masyarakat setempat. Dalam hal ini jelas bahwa pariwisata memiliki kontribusi penting untuk melawan ketimpangan dan ketimpangan ekonomi terutama dengan pengelolaannya yang berbasis masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat lokal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan merupakan strategi komunikasi yang tepat.

### 5.3 Pengembangan Wisata Berbasis Komunitas untuk Pencegahan Abrasi di Pantai Raja Kecil Kabupaten Bengkalis

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pariwisata berbasis masyarakat dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi dan sumber daya pariwisata (Giampiccoli & Glassom, 2020). Partisipasi masyarakat dalam



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengembangan pariwisata dalam mengatasi permasalahan abrasi merupakan kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan dalam kegiatan program pemerintah dalam mengatasi permasalahan abrasi di Kabupaten Bengkalis. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan wisata ini sekaligus bentuk usaha mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Partisipasi itu sendiri menjadikan keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut dalam proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam komunikasi pembangunan berkelanjutan, ada dua peranan utama pelibatan masyarakat ini, yaitu (1) transforming role atau menekankan pada peran komunikasi pembangunan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik, dan (2) socializing role atau komunikasi pembangunan memiliki peran untuk mempertahankan kearifan local yang telah melekat dimasyarakat serta mampu mempertahankan nilai-nilai tersebut disamping dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Menurut Parahita (Prasad, 2018: 3-22), komunikasi pembangunan berkelanjutan memiliki orientasi pada beberapa hal pokok diantaranya: (a) setiap elemen yang memiliki kepentingan dalam melakukan pembangunan saling bersinergi dan membangun rasa saling percaya satu sama lain, (b) perlunya saling pengertian dalam melakukan pembangunan, (c) pembangunan haruslah memerhatikan lingkungan alam tempat manusia tinggal, dan (d) komunikasi pembangunan berkelanjutan harus menarik partisipasi dari masyarakat dalam hal pemberdayaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi pembangunan berkelanjutan diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat setempat untuk ikut bersama melakukan pemberdayaan.

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam hal pengelolaan objek wisata pantai sangat menentukan keberhasilan pengembangan wisata Raja Kecil. Hal tersebut juga dikemukakan oleh pengelola wisata pantai Raja Kecil, yakni bapak solihin pada saat melakukan wawancara kemarin, berikut pernyataan beliau:



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

“untuk partisipasi dari masyarakat dalam hal pengelolaan wisata pantai Raja Kecil ini terbilang sangat amat banyak membantu kami sebagai pengelola. Bahkan Sebagian besar dari pengelola disini juga merupakan masyarakat asli desa Muntai Barat. Salah satu contoh yang bisa kita temukan dari partisipasi yang masyarakat berikan yaitu dengan memberikan lahan mereka untuk bisa kami gunakan sebagai keberlanjutan proyek pembangunan kami disini. Tepi pantai ini merupakan kebun dari masyarakat sekitar. Namun sayang karna adanya abrasi sedikit demi sedikit kebun mereka jatuh ke laut. Kami melakukan pengelolaan kaarna adanya bantuan masyarakat karena adanya pembebasan lahan, dari masyarakat disini ikhlas dan mau memberikan lahan mereka agar bisa terus kami kelola bersama.” (Hasil wawancara Solihin, 22 April 2022)

Masyarakat mau ikut berpartisipasi baik dengan ikut andil dalam mengelola wisata pantai Raja Kecil maupun dengan ikut menyumbang lahan agar wisata pantai bisa terus diperluas pembangunan berkelanjutannya.



Gambar 10: Lahan Hibah Masyarakat untuk Pembangunan Pantai Raja Kecil



Gambar 11: Lahan Hibah Masyarakat untuk pedagang di Pantai Raja Kecil

Banyak dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Pantai Raja Kecil ini merasa senang. Salah satu nya ada tenaga kebersihan yang ada dipantai Raja Kecil merupakan pemuda bahkan anak-anak desa muntai barat yang dengan ikhlas membantu membersihkan sampah yang ada di sekitar lokasi pantai Raja Kecil. Salah satu tenaga kebersihan, Memet mengatakan bahwa ia senang dapat ikut serta





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

membantu dalam mengelola pantai walaupun hanya sekedar menjadi tukang sapu disana.

“biasenye memet menyapu di sini pagi, kadang siang, sampai petang. Walau pon awak tak dapat nolong keje macam bapak itu, tapi tolong sedikit dah dapat pahala. Kadang kalau ada orang baik selalu Mamat diberi air kelapa bahkan juga makanan. Tapi yang paling enak pas hari raya, kadang Memet diberi air minuman kaleng, kadang ade juga memberi THR 20 ribu bahkan ada yang 50 ribu. Tapi yang tidak enak kalau lagi ramai, besepah sampah.” (Wawancara, Memet, 20 April 2022)

Keterlibatan masyarakat dalam membantu mengembangkan wisata dan menjadi pengelola dalam memajukan wisata pantai Raja Kecil ini terlihat sangat antusias. Pengunjung dan pengelola selama di tempat wisata juga bisa dikatakan sangat ramah dan saling bertegur sapa. Pengunjung memiliki keramahan dan senang bersosialisasi untuk sekedar membantu, namun demikian keterlibatan pengunjung belum Nampak pada kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti menjaga sampah-sampah bawaan mereka.

Keterlibatan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pengelolaan di wisata pantai Raja Kecil yaitu ikut berjualan di sana sehingga pengunjung tidak perlu merasa khawatir jika lapar dan haus. Dengan adanya kantin juga ikut membantu perekonomian masyarakat disana, karna memang mayoritas penjual di pantai dikhususkan untuk masyarakat desa muntai barat. Dari observasi yang peneliti lakukan ketika turun lapangan di Pantai Raja Kecil, peneliti juga melihat partisipasi lain yang dilakukan oleh masyarakat.

“Kakak yang duduk di loket tiket masuk jembatan itu merupakan masyarakat asli desa muntai barat yang terkadang juga bergantian dengan teman yang lainnya. mereka asli pemuda dan pemudi desa Muntai Barat yang dengan ikhlas ikut membantu disini, karena juga kan ini untuk desa mereka.” (Hasil wawancara Solihin, 22 April 2022)

Ungkap pak solihin ketika ditanya perihal yang menjaga loket. Terlihat disana kakak penjual karcis yang sedang melayani pengunjung yang hendak masuk kedalam jembatan datuh bandar jamal. Disetiap sudut jembatan, peneliti juga bisa melihat



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adanya para pemuda yang sedang bertugas jaga disana kalau-kalau takut ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari hasil observasi peneliti dengan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis yakni bapak Dr. H. Suwanto, S.Pd, M.Pd juga ditemukan adanya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam program pengelolaan pantai Raja Kecil, yang di bentuk langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis (Dispersip) yakni program TPBIS (transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial) yang didukung oleh perpustakaan nasional RI. Dalam kegiatan ini banyak dihadiri oleh masyarakat desa Muntai Barat dan juga anak-anak sekolah yang menjadi sasaran dari program ini.

Gambar 12: Kegiatan Literasi Edukasi Program Bengkalis Membaca di Pantai Wisata Raja Kecil



Sumber: Akun Instagram @wisata\_raja\_kecik\_ tahun 2022

Kepala desa mengatakan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengikuti kegiatan pelatihan untuk lebih mengerti dan pahan pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Selanjutnya dari wawancara



dengan pak subari juga diketahui adanya program edukasi untuk masyarakat Muntai Barat yakni pelatihan edukasi terkait menjaga alam.

“Kami dari desa juga telah membuat program pelatihan untuk masyarakat agar lebih mengerti bagaimana caranya menjaga lingkungan dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Muntai Barat baik dengan hasil lautnya maupun hasil perkebunan.” (Hasil wawancara Subari, 21 April 2022)

Gambar 13: Kegiatan Pelatihan di Desa Muntai Barat



Sumber: Dokumentasi Desa Muntai Barat tahun 2022

Pemerintah daerah dan desa juga ikut berpartisipasi agar masyarakat juga mau berperan dalam pemberdayaan di desa Muntai Barat ini. Seperti dengan banyak nya masyarakat yang ikut mengelola pantai Raja Kecil, banyak juga dari masyarakat yang berjualan di kedai-kedai yang ada di pantai, dan juga ada yang ikut berperan dalam pembudidayaan mangrove dan pohon geronggang yang nantinya kayu geronggang bisa diperjual belikan sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat setempat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengunjung wisata pantai Raja Kecil pada tanggal 22 April 2022 mengenai wisata pantai Raja Kecil. Menurut hasil wawancara peneliti dengan pengunjung tersebut mengatakan:



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

“Saya mengetahui wisata pantai Raja Kecil ini melalui tetangga saya. Dia tu setiap minggu pergi ke muntai untuk jalan-jalan dengan keluarga nya, saya sampai hapal kalau hari minggu tu pasti. Tu saya tanya lah kan, emang bagus katanya pantai disitu, banyak orang jualan juga tapi mereka lebih seneng bawak bekal dari rumah sambil dimakan dibawah pohon menikmati pemandangan di pantai. Abis tu foto-foto di jembatan, pernah juga saya lihat di fb dia bagus jembatannya. Tulah saya ajak keluarga saya kesini, ternyata memang bagus tempatnya. Jadinya sering saya kesini.” (Hasil wawancara Tarmiyah, 22 April 2022)

Tarmiyah mengetahui wisata pantai Raja Kecil karena adanya komunikasi yang dilakukan oleh tetangganya kepada dia dan juga melalui media sosial yang tetangganya bagikan sehingga Tarmiyah merasa tertarik untuk berkunjung ke pantai Raja Kecil. Peneliti juga mewawancarai masyarakat umum biasa dalam hal ini teman peneliti yang mengetahui akan adanya wisata pantai Raja Kecil tetapi belum pernah mengunjungi pantai tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

“Pantai Raja Kecil tu dah sering kali aku denger dari teman-teman aku. Katanya juga bagus kan apalagi kemaren sampai di datangi Presiden kan itu suatu pencapaian yang luarbiasa sih menurut aku. Di Instagram pengelola sama temen-temen aku juga sering liat mereka update pengunjung sama pembangunan disana juga. Aku belum pernah kesana sih tapi pengen juga. Cuma karna kuliah diluar kota juga tambah lagi ke Muntai tu butuh effort ya jauh banget jadi kayanya bener-bener harus nunggu ada moment dulu baru aku kesana.” (Hasil wawancara Tasya, 1 Mei 2022)

Meskipun Tasya belum pernah mengunjungi wisata pantai Raja Kecil tetapi dia tetap mengetahui info terbaru mengenai pantai Raja Kecil melalui obrolan bersama dengan teman-temannya dan juga postingan baik dari Instagram pengelola maupun teman-teman followers Instagram Tasya. Partisipasi dan keberlanjutan menjadi topik yang umum dibicarakan semenjak konferensi PBB dalam lingkungan dan pembangunan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro (Godemann & Michelsen, 2011). Lebih lanjut, Harald Heinmans berpendapat bahwa diskusi mengenai partisipasi dan keberlanjutan dalam pembangunan bagi masyarakat, lingkungan, dan teknologi. Partisipasi dalam pembangunan mestilah terstruktur, mengandalkan komunikasi dua





arah dan pihak terkait mencari solusi terhadap pembangunan secara bersama-sama (Jailani, 2019)

Komunikasi pembangunan sendiri menurut Payel Sen Chondhury didefinisikan sebagai penggunaan berbagai tipe media dalam konteks pembangunan yang mana diuraikan lagi sehingga memiliki dua peranan utama yaitu (1) *transforming role* atau menekankan pada peran komunikasi pembangunan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik, dan (2) *socializing role* atau komunikasi pembangunan memiliki peran untuk mempertahankan kearifan local yang telah melekat dimasyarakat serta mampu mempertahankan nilai-nilai tersebut disamping dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Menurut Parahita (Prasad, 2018: 3-22), mengemukakan bahwa komunikasi pembangunan berkelanjutan memiliki orientasi pada beberapa hal pokok diantaranya: (a) setiap elemen yang memiliki kepentingan dalam melakukan pembangunan saling bersinergi dan membangun rasa saling percaya satu sama lain, (b) perlunya saling pengertian dalam melakukan pembangunan, (c) pembangunan haruslah memerhatikan lingkungan alam tempat manusia tinggal, dan (d) komunikasi pembangunan berkelanjutan harus menarik partisipasi dari masyarakat dalam hal pemberdayaan.

Partisipasi pengembangan wisata dilakukan oleh masyarakat, baik itu masyarakat local desa Muntai Barat, maupun masyarakat umum yang hanya sebagai pengunjung maupun masyarakat umum bukan pengunjung. Partisipasi yang masyarakat lokal berikan yaitu dengan ikut melakukan pengelolaan di pantai Raja Kecik dan dengan menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Masyarakat yang tinggal ditepian pantai juga melakukan penanaman mangrove untuk melindungi lahan perkebunan mereka dari abrasi yang terjadi. Masyarakat desa muntai barat juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan mengenai lingkungan dan peletarian sumber daya alam sekitar agar bisa lebih mengerti dan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Masyarakat desa muntai barat juga ikut tergabung dalam kelompok pengelola wisata pantai Raja Kecik untuk bisa ikut serta melakukan pembangunan dan peneliharaan di tempat tinggal mereka sendiri. Peneliti melihat masyarakat desa Muntai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Barat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga lingkungan tempat mereka tinggal. Melalui kunjungan presiden pada tanggal 28 September 2021 kemarin, menjadikan masyarakat bengkalis terkhususnya masyarakat desa muntai barat lebih antusias dan peduli lagi serta menyadari betapa seriusnya abrasi yang ada di tempat tinggal mereka.

Selanjutnya partisipasi dari masyarakat umum baik dari pengunjung maupun bukan pengunjung juga sedikit banyak dirasakan. Melalui komunikasi interpersonal yang terjadi menjadikan banyak dari orang-orang merasa penasaran dan ingin mengunjungi wisata pantai Raja Kecik. Berbagai ulasan juga bisa ditemukan melalui postingan akun Instagram pengelola maupun masyarakat umum. Banyak dari pengunjung yang sengaja membagikan moment mereka ketika berada di pantai Raja Kecik melalui media sosial baik Instagram maupun facebook.

Peneliti melihat memang media sosial lah yang menjadi media tercepat dalam penyebaran informasi. Karena memang awal mula wisata pantai Raja Kecik dikenal oleh banyak orang melalui postingan akun Instagram @bengkalisku dan @bengkalis\_riau, membuat banyak orang penasaran sehingga sampai sekarang masih ramai akan pengunjung. Dalam pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di pantai Raja Kecik, peneliti mengaitkan dengan model community-based tourism (CBT) yang mana merupakan bentuk pariwisata dimana sejumlah besar masyarakat lokal memiliki kendali substansial atas dan keterlibatan dalam pengembangan dan pengelolaan. Proporsi utama dari manfaat tetap berada di dalam ekonomi lokal. Anggota masyarakat, bahkan mereka yang tidak terlibat langsung dalam usaha pariwisata, tetap mendapatkan beberapa bentuk manfaat juga.

Penelitian pariwisata berbasis masyarakat (CBT) membahas pemberdayaan, kemandirian, keadilan sosial, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi dan kesetaraan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, kepemilikan dan pembagian keuntungan menjadi milik masyarakat. CBT dapat dianggap sebagai sarana untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu meminimalkan kerusakan lingkungan dan budaya,



mengoptimalkan kepuasan pengunjung dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Dengan kata lain, pariwisata berkelanjutan tidak menguras ekonomi, sosial/budaya dan sumber daya lingkungan dan bahkan dapat memperkuat dan menyadarkan masyarakat akan budaya dan lingkungan. (Yasir et al., 2021)

Dalam penelitian ini masyarakat memiliki peranan penting dan ikut menjadi kendali dalam pembangunan dan pengelolaan di pantai Raja Kecil desa Muntai barat, dimana Sebagian besar pengelola merupakan masyarakat asli desa muntai barat. Masyarakat juga diberikan bekal dan pengetahuan yang lebih melalui pelatihan agar lebih mengerti dan mampu untuk terus melakukan pengelolaan dan pembangunan dengan tetap memperhatikan lingkungan tempat tinggal. Masyarakat juga menjadi bagian dari pelaku usaha sebagai pendorong dan mampu menjadi subjek perubahan sosial yang berkaitan dengan pengembangan produk dan pemasaran dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.

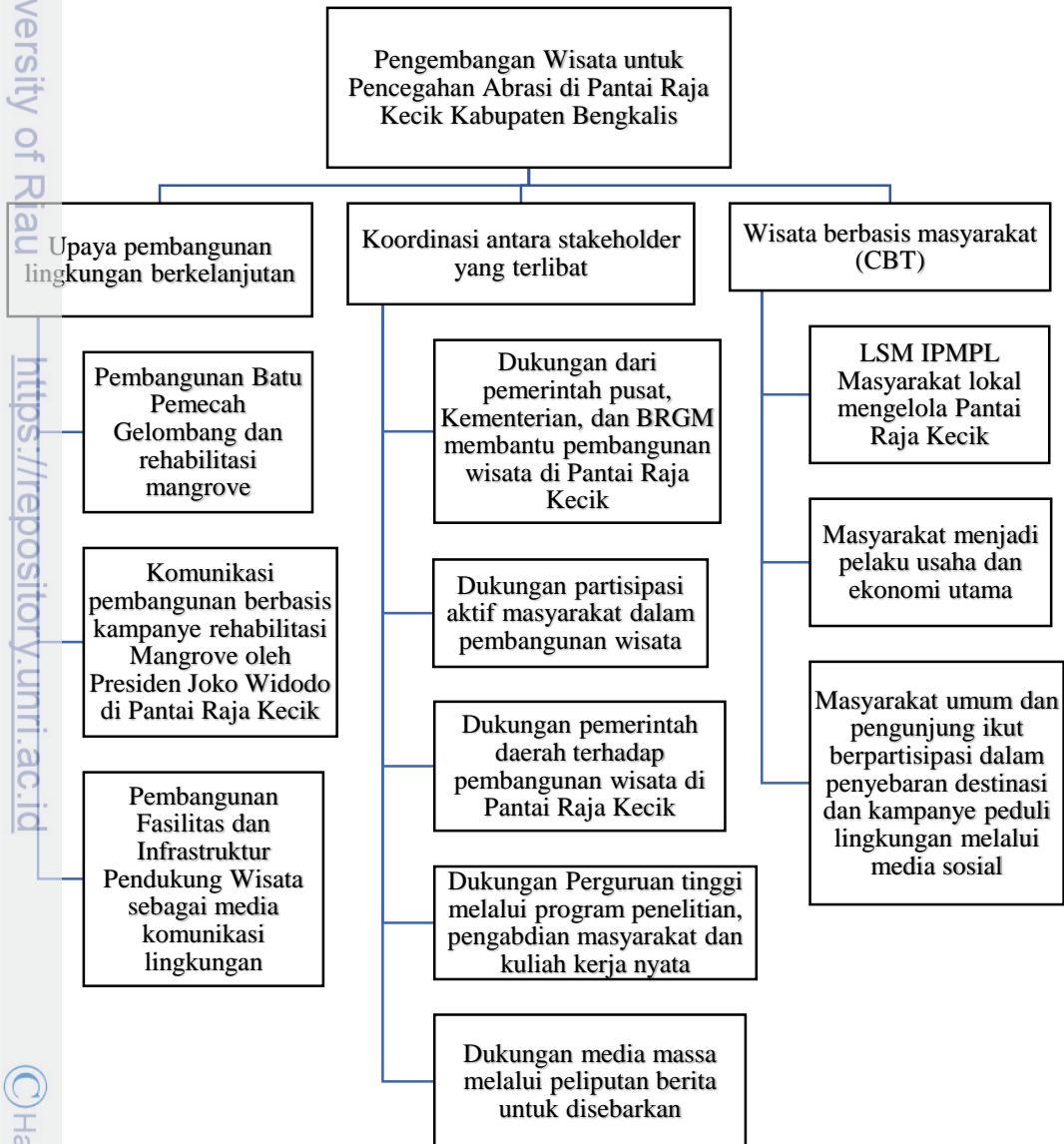
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gambar 14: Komunikasi Lingkungan Melalui Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat di Pantai Raja Kecil Kabupaten Bengkalis



Sumber: Hasil Penelitian 2022

Upaya memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan sebagai kunci keberhasilan komunikasi lingkungan sangat penting (Vlibeigi et al., 2020). Beberapa stakeholder telah membantu memperkuat masyarakat atau komunitas





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

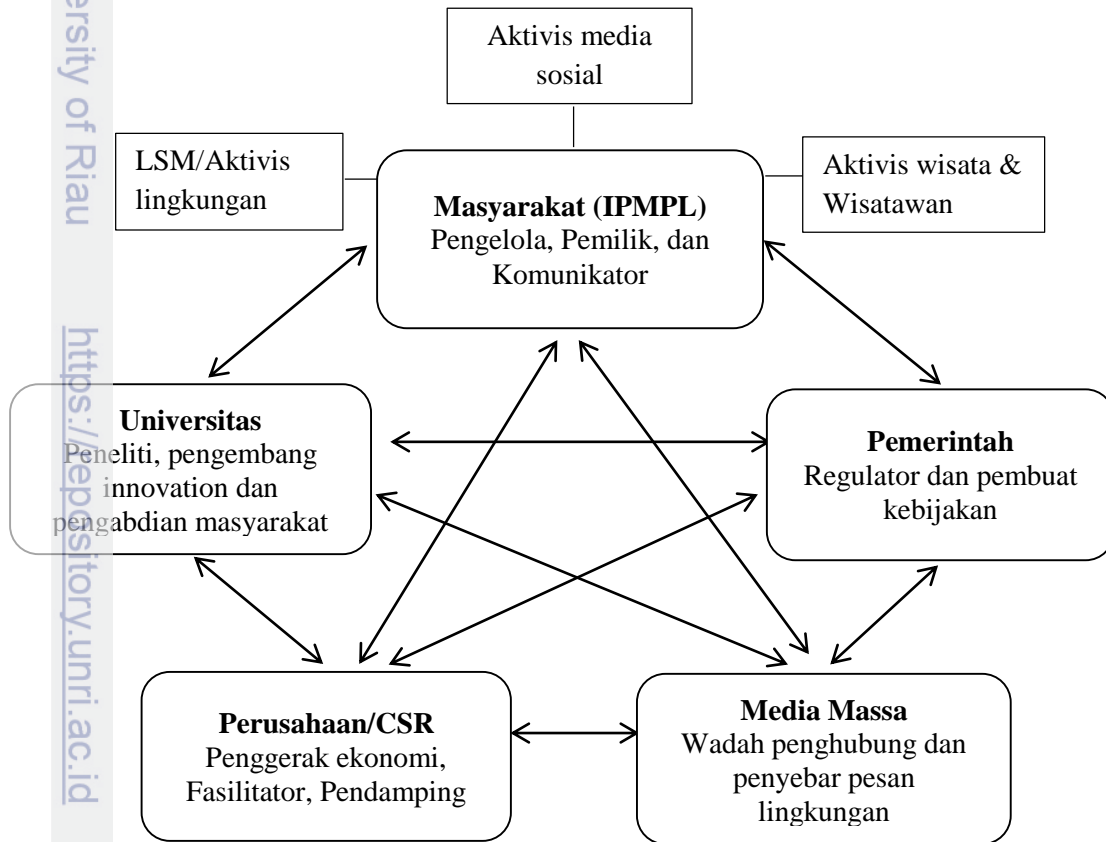
sebagai yang berperan penting dalam pengelolaan wisata dan pelestarian lingkungan pantai. Namun keberadaan stakeholder ini masih sangat terbataskewengangannya karena belum ada koordinasi yang baik dan komunikasi yang intens antar instansi atau lembaga ini. Selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada perguruan tinggi melalui program penelitian, pengabdian dan kuliah kerja nyata mahasiswa, selain itu juga dilakukan oleh media massa yang aktif melakukan peliputan kegiatan pengembangan dan aktivitas di Pantai Raja Kecik.

Oleh karena itu, pengembangan wisata dan pelestarian lingkungan telah mendapatkan dukungan dari stake holder, namun belum dilakukan secara maksimal. Dukungan dari berbagai aktor dan pemangku kepentingan ini sangat penting bagi kemajuan dan kesuksesan pencegahan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis. Komunikasi lingkungan untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dapat menjadikan pengelola ini sebagai komunikator, pesan, media, saluran dan sekaligus komunikasi untuk mengkampanyekan kesadaran lingkungan. Model Community Based Tourism (CBT) merupakan bentuk community-managed tourism dimana masyarakat lokal sendiri memiliki kontrol atas keterlibatan dalam pengelolaan dan pengembangannya. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dan ikut serta dalam mengontrol pengembangan dan pengelolaan pariwisata Raja Kecik. Masyarakat harus diberikan pengetahuan yang lebih melalui pelatihan dan pendampingan agar lebih memahami dan mampu terus melakukan pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gambar 15:  
Model Komunikasi Lingkungan Kolaboratif untuk Mitigasi Bencana Abrasi di Pantai Raja Kecil Kabupaten Bengkalis



Sumber: Hasil Penelitian 2022